

**FORMULIR ONE PAGE SUMMARY (ASPEK KELUARAN/OUTPUT)
PROGRAM KERJA UNGGULAN TPID TAHUN 2018
KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

| | |
|---|---|
| Nama Program Kerja: | INOVASI TATA KELOLA SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI INFLASI (SIANDINI) www.siandini.sumbawakab.go.id |
| Latar Belakang Pelaksanaan Program Kerja | <p>Sebelum Penerapan SIANDINI, TPID Kabupaten Sumbawa tidak memiliki basis data dan informasi untuk penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah. Data yang dimaksud adalah info harga pasar. Senyatanya, info harga dikirim secara rutin dari dinas yang membidangi perdagangan. Namun, sekretariat TPID tidak mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga TPID menggelar rapat koordinasi hanya sebatas “gugur kewajiban”.</p> <p>Sejatinya keputusan atau program pengendalian inflasi tanpa basis data yang valid dan akurat, akan cenderung tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu. Kondisi yang terjadi adalah: (i) jenis komoditi yang dipantau tidak konsisten, (ii) info harga tidak terorganisir dengan baik, (iii) bias informasi, (iv) rekomendasi tanpa analisa komprehensif.</p> <p>Bahkan, sebelum SIANDINI diterapkan, notulensi rapat TPID pun tidak ada. Rakor selama tahun 2017 tidak dilaksanakan, Rakor Tahun 2016 pun demikian. Pengendalian inflasi daerah tidak dalam kendali. Artinya, Forum TPID yang strategis itu, yang di dalamnya ada kepala daerah, sekda dan kepala dinas belum melaksanakan pengendalian inflasi sebagaimana mestinya. Pun rapat TPID dilaksanakan, dapat dipastikan tidak akan menghasilkan keputusan yang komprehensif. Sementara itu pengendalian inflasi daerah membutuhkan basis keputusan yang komprehensif dan dilaksanakan dengan sinergis.</p> <p>Bias informasi dan rekomendasi tanpa analisa komprehensif yang terjadi sebelum SIANDINI diterapkan terjadi karena memang Kabupaten Sumbawa adalah Kabupaten Non IHK. Jadi, pengendalian inflasi Kabupaten Sumbawa akan mengacu ke angka-angka statistik dari BPS yang dipublikasikan berdasarkan Kota IHK, yaitu Kota Bima dan Kota Mataram yang diagregasikan menjadi inflasi Provinsi. Bulog pernah gelar operasi pasar karena info ‘harga beras naik’. Info ini dimulai dari Jakarta sampai ke Mataram dan mengalir ke Sumbawa. Hasilnya, komoditi beras yang dijual, sepi pembeli.</p> <p>Pun demikian, angka dan nilai-nilai statistik yang dikeluarkan itu bersifat makro bagi Kabupaten Sumbawa yang Non IHK. Informasi makro membantu Pemda menentukan arah bagi pembangunan termasuk pengendalian inflasi daerah, namun belum bisa menjawab masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa berkepentingan untuk membangun hal-hal mikro yang ada di tengah masyarakat guna menyusun langkah-langkah dan upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh.</p> <p>Fenomena yang diungkapkan di atas itu berpengaruh pada kinerja pelayanan publik. Terutama pada kinerja pembangunan ekonomi. Akar masalahnya adalah</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>data. Pengolahan data. Kabupaten Non IHK seperti Kabupaten Sumbawa akan mendapatkan 2 permasalahan pokok tentang data. <i>Pertama</i>, Pemda Non IHK masih minim literasi tentang inflasi sehingga data yang ada belum mampu dikelola dan diolah dengan baik, maka otomatis Pemda Non IHK akan menunjukkan progress pengendalian inflasi yang rendah.</p> <p><i>Kedua</i>, Pemda Non IHK jika mengacu pada publikasi BPS di tingkat provinsi dengan sample di wilayah IHK, tidak cukup <i>feasible</i> untuk dimasukkan ke dalam perencanaan dan penganggaran upaya pengendalian inflasi daerah ke dalam APBD. Dalam perencanaan dan penganggaran APBD itulah titik mula sinergitas upaya pengendalian inflasi. Sebab, harga yang menjadi dasar dalam penghitungan ekonomi adalah inti dari semua proses produksi dan menjadi “puncak gunung es” dari banyak variabel yang mempengaruhinya.</p> <p>Jika wilayah Non IHK tidak melakukan inovasi tata kelola pengendalian inflasi daerah yang bertumpu pada TPID, lalu terjebak pada 2 masalah di atas, maka dapat dipastikan wilayah tersebut belum melakukan pengendalian inflasi daerah sebagaimana mestinya. Walaupun dilaksanakan kegiatan operasi pasar atau kegiatan lainnya cenderung akan berdasar pada arus informasi dari wilayah lain (IHK) yang akan <i>bias</i> jika diterapkan di wilayah Non IHK.</p> <p>Dari latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, Bagian Perekonomian, setelah mengidentifikasi masalah dalam pengendalian inflasi daerah, merumuskan satu jalan keluar: membangun sistem informasi.</p> <p>Sistem informasi yang menjawab permasalahan tata kelola pengendalian inflasi daerah. Dalam tata kelola itu, menjadi penting dibangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) bagi TPID agar TPID memberikan dampak positif untuk menghasilkan tata kelola pembangunan berkinerja tinggi yang pada akhirnya bermanfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, harga-harga barang yang stabil sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi tata kelola itu bernama Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI) Sumbawa yang dapat dilihat di situs www.siandini.sumbawakab.go.id</p> |
| <p>Implementasi Program/ Kegiatan (termasuk penjelasan sumber pembiayaannya dan kerjasama dengan daerah lain/Stakeholder lain)</p> | <p>Terdapat 5 Tahap Kerja Siandini sebagai Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Tahapan ini merupakan gambaran arus data dan informasi bagi TPID sebagai berikut:</p> <p>1. Survey Harga</p> <p>Survey harga dilakukan secara berkala sesuai dengan karakteristik komoditas berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2015. Dilaksanakan di pasar tradisional pada pedagang dan komositas secara konsisten. Data dimasukkan secara elektronik ke aplikasi SIANDINI. Selain harga konsumen, juga dimasukkan data tingkat produsen dan data tingkat pengusaha (pengumpul) untuk komoditi pertanian seperti komoditi pangan, hortikultura, perkebunan. Data-data relevan juga dimasukkan ke dalam SIANDINI guna kepentingan analisis. Selengkapnya dapat diakses situs www.siandini.sumbawakab.go.id.</p> |

2. Pengolahan Data Otomatis

Setelah diverifikasi oleh pengelola data, data yang di-entry oleh surveyor diolah secara otomatis sesuai dengan formulasi yang telah dibangun dalam SIANDINI. System menampilkan perkembangan harga dalam bentuk tabel, grafik, dan peringatan dini untuk masing-masing kelompok harga konsumen, harga produsen dan harga di tingkat pengusaha pengumpul.

3. Analisis Penyebab dan Risiko

Tim Pemantau dan Analisa Harga (TPAPH) yang terdiri dari seluruh OPD mengkaji dan memverifikasi laporan dan analisis yang disajikan oleh SIANDINI untuk dianalisis faktor penyebab dan risiko inflasi. Selanjutnya Tim TPAPH menyusun rekomendasi dan alternatif kebijakan.

4. Rapat TPID. Forum Pengambil Keputusan

TPAPH menyampaikan laporan hasil analisis terhadap faktor penyebab dan risiko inflasi serta pilihan-pilihan kebijakan pada forum TPID yang merupakan forum pengambil keputusan. Keputusan Rapat TPID dituangkan ke dalam risalah rapat dan diajukan nota dinas.

5. Penyusunan Regulasi dan Aksi Pengendalian Inflasi

Penyusunan regulasi daerah tentang aksi pengendalian inflasi dilakukan dan didistribusikan ke OPD sesuai kewenangan untuk diimplementasikan secara sinergis dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Aksi yang dilaksanakan dapat berupa antisipasi risiko inflasi, penanganan langsung peristiwa kenaikan harga, dan perancangan kebijakan jangka panjang. Untuk hal ini telah disusun *roadmap* TPID.

Sumberdaya SIANDINI adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

- a. Tahun 2018: Total Rp.190.000.000,- Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah. Untuk Pembuatan aplikasi SIANDINI sebagai *tools* dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,-
- b. Tahun 2019: Total Rp. 152.457.440,- Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah. Untuk maintenance dan pengembangan SIANDINI dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,-

2. Sumberdaya Manusia

- a. Tim TPID (SK Bupati Sumbawa Nomor 187 Tahun 2018)
- b. Tim Pemantau dan Analisa Perkembangan Harga (SK Bupati Sumbawa Nomor 201 Tahun 2018)
- c. Tim Programmer;
- d. Tim Survey dan Pengolah Data.

Untuk meningkatkan kehandalan SIANDINI dan efektifitas Tata Kelola TPID, kerjasama dan koordinasi dilakukan dengan:

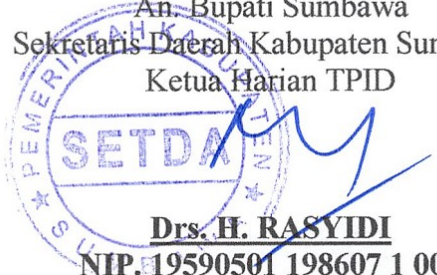
1. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB dalam hal tukar menukar data dan informasi;
2. Dinas Perdagangan Provinsi NTB dalam hal upaya pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan seperti Sistem Resi Gudang;

| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. BPS dalam hal asesment mekanisme dan prosedur pengolahan data; 4. Bulog Provinsi NTB dalam hal pengendalian inflasi daerah; <p>Dalam SIANDINI www.siandini.sumbawakab.go.id terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktori Beranda. Berisi info harga terkini bagi publik yang terdiri dari harga tingkat konsumen, harga tingkat produsen dan harga tingkat pengusaha pengumpul. 2. Direktori Laporan dan Analisis. Berisi 4 (empat) kategori yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan Tabel Harga b) Laporan Grafik Harga c) Analisis Trend d) Pola Inflasi <p>Masing-masing kategori di atas terdiri dari 3 item: harga konsumen, harga produsen dan harga pengusaha pengumpul. Inilah peringatan dini inflasi. Seluruh data dan informasi inilah yang menjadi input analisis yang selanjutnya menjadi Sistem Pendukung Keputusan (<i>Decisions Support System</i>) bagi TPID.</p> 3. Direktori Tentang. Direktori ini berisi informasi tentang TPID dan dokumen-dokumen yang relevan bagi TPID. 4. Direktori Infografis. Direktori ini berisi informasi dalam bentuk grafis yang relevan dengan pengendalian inflasi daerah. 5. Direktori Berita/ Artikel. Direktori ini berisi berita dan artikel yang relevan dengan pengendalian inflasi daerah serta tentang SIANDINI. 6. Direktori Galeri. Direktori ini berisi dokumentasi berupa photo dan video yang relevan dengan SIANDINI dan TPID dalam pengendalian inflasi daerah. 7. Direktori Login. Direktori ini adalah direktori bagi admin untuk entry data harga konsumen, harga tingkat produsen, dan harga tingkat pengusaha pengumpul. Harga konsumen diambil di pasar tradisional. Harga tingkat produsen dan pengusaha pengumpul di-input oleh OPD-OPD terkait. <p>Jadilah SIANDINI menjadi satu basis data yang terintegrasi dan diolah menjadi informasi. Informasi inilah yang menjadi <i>tools</i> bagi pengambil keputusan di forum TPID yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan dan pelayanan publik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</p> <p>Dalam melakukan analisis dan perumusan rekomendasi, terlibat Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga yang akan di-pleno-kan dalam forum TPID.</p> |
| <p>Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan (termasuk penjelasan dampak jangka pendek dan/ atau jangka panjang)</p> | <p>Dampak yang diperoleh dari Penerapan SIANDINI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan satu basis data yang diolah dengan baik dalam SIANDINI: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat lagi egosentris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektoral. Terbentuk sinergitas mulai dari <i>mindset</i> sampai program dan aksi; b. Pemerintah daerah mengetahui dengan benar kondisi senyatanya terkait dengan perekonomian daerah dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat konsumen, masyarakat produsen, dan masyarakat bisnis/ swasta; |

- c. Pemerintah daerah mengetahui dan menjadi responsif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan perekonomian di daerah;
 - d. TPID/ Pemda mampu mengantisipasi inflasi dan deflasi beserta risiko yang akan terjadi. Dapat dirancang upaya penanganan jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan secara sinergis berdasarkan tupoksi dan kewenangan masing-masing OPD.
 - e. Menunjang kinerja OPD-OPD yang tupoksinya sektoral dan menjadi *core* dalam pelayanan publik.
2. Para anggota TPID lebih bersemangat, efektif, dan efisien dalam pengambilan keputusan karena dengan tata kelola yang baik, kepala daerah menjadi mudah men-*deliver* pesan pembangunan dan pengendalian inflasi daerah yang akan dituangkan dalam program dan aksi;
 3. Fungsi manajemen (POAC) tampak nyata dalam TPID dan pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu fokus dalam penyusunan program dan aksi pemerintah daerah;
 4. Terbentuk sebuah sistem pengambilan keputusan oleh TPID. Dengan SIANDINI sebagai Sistem Pendukung Keputusan/ *Decisions Support System*, terjadi sinergitas antar OPD. Sinergitas tersebut dirumuskan dalam Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga yang salah satu tugasnya adalah merumuskan rekomendasi kebijakan untuk diputuskan dalam Rapat TPID;
 5. Publik ter-literasi tentang inflasi karena info harga terkini dapat dilihat di situs www.siandini.sumbawakab.go.id dan disebarluaskan melalui medsos.
 6. SIANDINI menjadi Top-3 Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
 7. SIANDINI menjadi TOP-10 Lomba Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTB Tahun 2018;
 8. Sistem SIANDINI dalam menentukan trend, pola inflasi daerah dan peringatan dini inflasi diadaptasikan oleh Bank Indonesia Perwakilan NTB untuk mengukur dan menentukan pola inflasi di 2 (dua) Kota IHK di NTB;
 9. Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB meminta dan menekankan kepada 7 (tujuh) Kabupaten (Non IHK) di NTB dan 2 (dua) kota IHK di NTB untuk mereplikasi SIANDINI di TPID masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Rakor High Level Meeting TPID Provinsi NTB, Mataram, 21 Februari 2019;
 10. SIANDINI menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam APBD yang salah satu fokusnya adalah merumuskan program yang berpihak pada kesejahteraan petani, nelayan dan peternak. Misalnya mengoperasikan Sistem Resi Gudang Kabupaten Sumbawa yang selama ini belum melayani petani;
 11. Kabupaten Non IHK yang ada di Provinsi NTB sudah berkomunikasi dan koordinasi dalam rangka replikasi SIANDINI di daerahnya.

| | |
|--|---|
| Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan | <p>Tindak Lanjut yang Akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun Anggaran 2019, SIANDINI akan diperluas perannya dalam mewujudkan tata kelola berkinerja tinggi dalam pembangunan perekonomian daerah. Hal ini akan dimulai dengan Pengintegrasian data tingkat harga konsumen, tingkat harga produsen dan tingkat harga pengusaha pengumpul sampai pengintegrasian data inventory/ stok komoditi dalam daerah dan jalur logistik/ jalur distribusi yang mempengaruhi inflasi. 2. Bersinergi dalam mewujudkan Desa Bebas Rentenir sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017; 3. Tahun Anggaran 2019, SIANDINI disusun dalam format aplikasi dalam play store yang compatible dioperasikan pada platform berbasis Android dan IOS. 4. Tahun Anggaran 2020, SIANDINI bisa mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Sumbawa dengan mengacu pada Diagram Timbang yang diterbitkan BPS. 5. Saat ini dan seterusnya melaksanakan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam roadmap pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan 4K Strategies. 6. Saat ini dan seterusnya mengelaborasi tindak lanjut System Pendukung Keputusan dengan memperluas ke unit kerja lain (OPD) lain guna pelaksanaan agenda pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan petani (produsen). 7. Tahun Anggaran 2019, menyusun Peraturan Bupati Sumbawa tentang Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI). |
|--|---|

Sumbawa Besar, 8 April 2019
 An. Bupati Sumbawa
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa,
 Ketua Harian TPID



Drs. H. RASYIDI
 NIP. 19590501 198607 1 001

Link:

- Website: www.siandini.sumbawakab.go.id
- Video Profile Siandini: <https://www.youtube.com/watch?v=F6YEczHcT3s>
- Video Kata Mereka: <https://www.youtube.com/watch?v=RHLi2hVSxXE>
- Video Panduan Penggunaan (Ringkasan): <https://www.youtube.com/watch?v=k3p3UjP454g>
- Video Panduan Penggunaan (Full): <https://www.youtube.com/watch?v=0AqTveHoz6Q>
- Video SRG Melayani Petani: <https://www.youtube.com/watch?v=Am4xF62i1z8>
- Facebook: Tpid Sumbawa Siandini